



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH
[LKPJ]**

TAHUN 2023

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jln. Ile Lewotolok No. Telp / Fax [0383] 21240

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena bimbingan dan penyelenggaraan Ilahi-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada umumnya dan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023. Semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai tugas dan karya kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,


RUFUS KODA TELUMA, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690725 199793 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum (Diisi oleh Tim Penyusun)

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)

1.3. Data Umum Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)

1. Data Geografis Wilayah (Diisi oleh Tim Penyusun).
2. Jumlah Penduduk (Diisi oleh Dinas Penduk Capil).
3. Pertumbuhan Penduduk (Diisi oleh Dinas Penduk Capil).
4. Jumlah ASN.

Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 5344 orang
terdiri dari PNS : 4346 dan PPPK sebanyak : 998 orang

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (Diisi oleh BKAD).
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (Diisi oleh BKAD).
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan (Diisi oleh BKAD).

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(Diisi oleh Tim Penyusun / BKAD)

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut rekm
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
1	BPKPSDMD	KEPEGAWAIAN		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.603.744.798		119,61	4.837.285.807	86,32			
				KEPEGAWAIAN		5.556.745.078		119,22	4.790.619.127	86,21			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		3.565.082.475		133,25	3.310.158.569	92,85			
				Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		68.858.470		100,00	68.763.725	0,00			
				Penyusunan Dokumen									
				1 Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	29.965.000	2	100,00	29.879.275	99,71		
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	12.000.000	1	100,00	12.000.000	100,00		
				Koordinasi dan Penyusunan									
				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	14.889.770	4	100,00	14.880.750	99,94		
				4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	12.003.700	1	100,00	12.003.700	100,00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.179.810.119		85,96	2.941.630.106	92,51		
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org/bln	3.119.810.459	41	107,89	2.881.630.506	92,37		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	44.999.660	12	100,00	44.999.600	100,00		

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut rekm
					Klnerja	Anggaran	Klnerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan 3 Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000	1	50,00	15.000.000	100,00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		14.999.840		100,00	14.998.500	99,99			
				Penyusunan Perencanaan 1 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.999.900	1	100,00	4.999.900	100,00			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan 2 Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.999.940	2	100,00	9.998.600	99,99			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.500.000		100,00	7.500.000	100,00			
				1 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	7.500.000	1	100,00	7.500.000	100,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		176.728.001		100,00	176.292.368	99,75			
				Peyediaan Komponnen 1 Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.980.501	1	100,00	2.682.000	89,98			
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	20.004.950	2	100,00	20.004.500	100,00			
				3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	7.500.250	2	100,00	7.499.500	99,99			
				4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	12.000.000	1	100,00	12.000.000	100,00			
				5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	25.002.300	2	100,00	25.002.000	100,00			

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut rekm
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
				6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	900.000	1	100,00	900.000	100,00			
				7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	12	100,00	20.000.000	100,00			
				8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.340.000	12	100,00	88.204.368	99,85			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25.700.000		400,00	24.758.000	96,33			
				1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	25.700.000	4	400,00	24.758.000	96,33			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40.560.000		100,00	38.856.860	95,80			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	12	100,00	1.500.000	100,00			
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	29.460.000	12	100,00	27.756.860	94,22			
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	9.600.000	12	100,00	9.600.000	100,00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.926.045		80,00	37.359.010	73,36			

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut rekm
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	14.043.305	5	100,00	9.518.010	67,78			
				2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2.950.000	2	100,00	2.950.000	100,00			
				3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25.986.490	1	100,00	24.241.000	93,28			
				4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4.950.000	4	100,00	650.000	13,13			
				5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	2.996.250	-	0,00	-	0,00			
				Program Kepegawaian Daerah	14,68	1.991.662.603	14,68	105,19	1.480.460.558	74,33			
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		771.223.810		100,00	764.530.283	99,13			
				1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	25.001.750	2	100,00	24.229.230	96,91			

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut rekm	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	
				2 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	669.999.360	2	100,00	664.285.553	99,15	* Belum memiliki ruang CAT khusus untuk pelaksanaan test	* Sewa pakai gedung yang bisa menampung peserta test	
												* Masih terbatasnya jumlah perangkat PC untuk pelaksanaan test	* Meminjam pada sekolah yang memiliki perangkat PC yg memenuhi standar	
												* Regulasi yang berubah untuk pelaksanaan test	* Menyesuaikan dgn regulasi yg ada	
				3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7	Dokumen	39.998.750	7	100,00	39.998.750	100,00	* Kesalahan data di database saat pengusulan seperti nama, masa kerja , dll	* Koordinasi langsung dengan BKN	
				4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dokumen	19.999.700	3	100,00	19.794.500	98,97	* Suplay data dari subbid yg lain terlambat akibat keterlambatan proses	* Koodinasi dengan subbid yang bersangkutan	
				5 Pengelolaan Data Kepegawaian	4	Dokumen	16.224.250	4	100,00	16.222.250	99,99	* Data Dukung selalu kurang menghambat proses pengusulan	* Koordinasi langsung dengan OPD terkait	
				Mutasi dan Promosi ASN			942.572.880		100,00	512.820.433	54,41	* Jumlah peserta yang terbatas	* Penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan ini	
				1 Pengelolaan Mutasi ASN	2	Dokumen	24.995.575	2	100,00	24.034.500	96,16			
				2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Dokumen	75.000.225	4	100,00	74.532.000	99,38	* Proses verifikasi di BKN terlambat sehingga SK Pangkat terlambat	* Koordinasi langsung dengan BKN * Sosialisasi bagi para pengelola Kepeg di OPD	

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut rekm
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
											* Anggaran terbatas dan terbatasnya fasilitas akibat diberlakukan sistem digitalisasi	* Penambahan anggaran fasilitas untuk mendukung kegiatan	
				3 Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	842.577.080	3	100,00	414.253.933	49,17	* Menunggu Rekomendasi Pelaksanaan dari KSN dan Kemendagri yang lama mempengaruhi jadwal pelaksanaannya(pansel atau pemetaan/ujikompetensi eselon III)	* Koordinasi langsung dengan Kemendagri dan KSN	
				Pengembangan Kompetensi ASN		120.000.050	155	112,44	116.887.442	97,41			
				1 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	30.000.030	2	100,00	27.348.550	91,16	* Banyak jabatan yang sudah di lakukan Penyetaraan jabatan dan itu mempengaruhi peserta sehingga tidak dapat ikut Ujian Dinas/UPI		
				2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	75 Orang	60.000.000	103	137,33	59.999.000	100,00	* Laporan dari mahasiswa Tubel, lbel sering tidak tepat waktu	* Koordinasi dengan mahasiswa yang bersangkutan	
				3 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	50 Orang	30.000.020	50	100,00	29.539.892	98,47	* Data Dukung selalu kurang menghambat proses pengusulan	* Koordinasi langsung dengan OPD terkait	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		157.865.863	47	108,33	86.222.400	54,62			
				1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	29.999.665	2	100,00	29.877.100	99,59			
				2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20 Orang	20.000.073	20	100,00	19.998.500	99,99	* Target penerima SLKS tidak ada, karena terbatasnya anggaran	* Perlu alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini	

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut rekn
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
				3 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	107.866.125	25	125,00	36.346.800	33,70	* Laporan dari OPD sering terlambat	* Koordinasi dengan OPD melalui surat	
											* Penyampaian LHP dari Inspektorat terlambat	* Koordinasi dengan Inspektorat secara langsung	
1	BPKPSDMD	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan		46.999.720		120,00	46.666.680	99,29			
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	14,68	46.999.720		120,00	46.666.680	99,29			
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		46.999.720		120,00	46.666.680	99,29			
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	46.999.720	24	120,00	46.666.680	99,29			
				TOTAL		5.603.744.798		119,61	4.837.285.807	86,32			

3.1.1. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1.	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap. Cap.Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Cap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38 Orang/bulan	41 Orang/bulan	107,89
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	1 Laporan	50

		SKPD	<i>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	2 Laporan	2 Laporan	100
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)</i>	1 Paket	1 Paket	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1 Paket	1 Paket	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100

		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)</i>	1 Unit	4 Unit	400
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	5 Unit	4 Unit	80
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	2 Unit	2 Unit	100
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	1 Unit	100
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>	4 Unit	4 Unit	100

		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	-	-
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	100

		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	75 Orang	104 Orang	138
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	50 Orang	50 Orang	100
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	20 Orang	-	-
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20 Laporan	25 Laporan	125
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20 Orang	20 Orang	100

a. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.565.082.475
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.858.470
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.965.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.889.770
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.003.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.179.810.119
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.810.459
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	44.999.660
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.999.840
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.999.900
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.940
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000
4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.500.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.728.001
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.980.501
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.004.950
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.250
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.002.300

5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.340.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.700.000
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.700.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	40.560.000
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.460.000
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.926.045
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.043.305
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.950.000
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.986.490
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.996.250
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.991.662.603
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	771.223.810
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.001.750
9.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	669.999.360
9.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.998.750
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.999.700
9.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	16.224.250
10	Mutasi dan Promosi ASN	942.572.880

10.1	Pengelolaan Mutasi ASN	24.995.575
10.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.225
10.3	Pengelolaan Promosi ASN	842.577.080
11	Pengembangan Kompetensi ASN	120.000.050
11.1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	30.000.030
11.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.000.000
11.3	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	30.000.020
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	157.865.863
12.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.999.665
12.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20.000.073
12.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	107.866.125
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46.999.720
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	46.999.720
13.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	46.999.720
	TOTAL BELANJA	5.603.744.798

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.565.082.475	3.310.158.569	92,85
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.858.470	68.763.725	99,86
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.965.000	29.879.275	99,71
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.889.770	14.880.750	99,94

1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.003.700	12.003.700	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.179.810.119	2.941.630.106	92,51
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.810.459	2.881.630.506	92,37
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	44.999.660	44.999.600	100,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.999.840	14.998.500	99,99
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.999.900	4.999.900	100,00
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.940	9.998.600	99,99
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100,00
4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.500.000	7.500.000	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.728.001	176.292.368	99,75
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.980.501	2.682.000	89,98
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.004.950	20.004.500	100,00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.250	7.499.500	99,99
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.002.300	25.002.000	100,00
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	100,00
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	100,00
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.340.000	88.204.368	99,85
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.700.000	24.758.000	96,33
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.700.000	24.758.000	96,33
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	40.560.000	38.856.860	95,80

7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.460.000	27.756.860	94,22
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000	9.600.000	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.926.045	37.359.010	73,36
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.043.305	9.518.010	67,78
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.950.000	2.950.000	100,00
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.986.490	24.241.000	93,28
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000	650.000	13,13
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.996.250		0,00
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.991.662.603	1.480.460.558	74,33
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	771.223.810	764.530.283	99,13
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.001.750	24.229.230	96,91
9.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	669.999.360	664.285.553	99,15
9.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.998.750	39.998.750	100,00
9.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.999.700	19.794.500	98,97
9.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	16.224.250	16.222.250	99,99
10	Mutasi dan Promosi ASN	942.572.880	512.820.433	54,41
10.1	Pengelolaan Mutasi ASN	24.995.575	24.034.500	96,16
10.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.225	74.532.000	99,38
10.3	Pengelolaan Promosi ASN	842.577.080	414.253.933	49,17
11	Pengembangan Kompetensi ASN	120.000.050	116.887.442	97,41

11.1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	30.000.030	27.348.550	91,16
11.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.000.000	59.999.000	100,00
11.3	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	30.000.020	29.539.892	98,47
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	157.865.863	86.222.400	54,62
12.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.999.665	29.877.100	99,59
12.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20.000.073	19.998.500	99,99
12.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	107.866.125	36.346.800	33,70
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46.999.720	46.666.680	99,29
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	46.999.720	46.666.680	99,29
13.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	46.999.720	46.666.680	99,29
	TOTAL BELANJA	5.603.744.798	4.837.285.807	86,32

Pencapaian Kinerja OPD dan realisasi anggaran serta presentase pencapaian kinerja dapat dirincikan, sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. Jumlah total dana **Rp. 3.565.082.475,-** dimana jumlah total realisasi sebesar **3.310.158.569,-** dan persentase penyerapan anggaran sebesar **92,85%**.
2. **Program Kepegawaian Daerah**, merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional dan akuntabel. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar **Rp. 1.991.662.603,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.480.460.558,-** atau persentase serapan sebesar **74,33%**.
3. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Tujuan program ini adalah mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan berkompeten di bidang tugasnya. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar **Rp. 46.999.720,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 246.666.680,-** atau persentase serapan sebesar **99,29%**.

c. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2023 telah disesuaikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program RKPD TA 2023 dan DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2023.

**Tabel 3.4. Kesesuaian Program RKPD dan Program DPPA
Tahun 2023**

No	PROGRAM RKPD	No	PROGRAM DPPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Kepegawaian Daerah	2.	Program Kepegawaian Daerah
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

d. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

1. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan urusan wajib Kepegawaian yang dijabarkan dalam 3 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kepegawaian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.991.662.603	1.480.460.558	74,33
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	771.223.810	764.530.283	99,13
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.001.750	24.229.230	96,91
9.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	669.999.360	664.285.553	99,15
9.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	39.998.750	39.998.750	100,00

	Pemberhentian			
9.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.999.700	19.794.500	98,97
9.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	16.224.250	16.222.250	99,99
10	Mutasi dan Promosi ASN	942.572.880	512.820.433	54,41
10.1	Pengelolaan Mutasi ASN	24.995.575	24.034.500	96,16
10.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.225	74.532.000	99,38
10.3	Pengelolaan Promosi ASN	842.577.080	414.253.933	49,17
11	Pengembangan Kompetensi ASN	120.000.050	116.887.442	97,41
11.1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	30.000.030	27.348.550	91,16
11.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.000.000	59.999.000	100,00
11.3	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	30.000.020	29.539.892	98,47
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	157.865.863	86.222.400	54,62
12.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.999.665	29.877.100	99,59
12.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20.000.073	19.998.500	99,99
12.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	107.866.125	36.346.800	33,70
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46.999.720	46.666.680	99,29
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	46.999.720	46.666.680	99,29
13.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	46.999.720	46.666.680	99,29
	TOTAL BELANJA	2.038.662.323	1.527.127.238	74,90

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Program Kepegawaian Daerah

Anggaran yang tersedia untuk Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp. 1.991.662.603,- dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.480.460.558,- atau 74,33%. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

Program ini diimplementasikan dalam 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

a) Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Untuk Tahun 2023 kegiatan Pelaksanaan Pengadaan ASN diawali dengan :

1. Penetapan Formasi

Penetapan Formasi CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Keputusan Menpan RB Nomor 546 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Daftar Alokasi Formasi CASN Tahun 2023

ASN	ALOKASI FORMASI
PPPK Teknis	347
PPPK Fungsional Kesehatan	225
PPPK Fungsional Guru	228
TOTAL ALOKASI	800

b) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Pendaftaran dan Seleksi Administrasi

Pendaftaran dan seleksi Administrasi berdasarkan Jadwal yang telah ditentukan.

Tabel 3.7. Jumlah Pelamar Seleksi Administrasi CASN Tahun 2023

ASN	Jumlah Pelamar	Seleksi Administrasi	
		MS	TMS
PPPK Teknis	1221	972	249
PPPK Fungsional Kesehatan	835	758	77
PPPK Fungsional Guru	520	520	-
TOTAL	2576	2250	326

Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan Seleksi untuk masing-masing kategori CASN (Guru, Medis dan Teknis) sesuai dengan jadwal yang telah di susun.

a. Penetapan NI PPPK

Tabel 3.8. Kelulusan Seleksi CASN Tahun 2023

CASN	JUMLAH LULUS
PPPK Teknis	230
PPPK Fungsional Kesehatan	195
PPPK Fungsional Guru	221
TOTAL	646

c) Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Target kinerjanya adalah terlaksananya proses administrasi bagi PNS yang memasuki masa purnabakti/pensiun (baik BUP, maupun janda duda) sebanyak 150 orang. Realisasinya di Tahun 2022 adalah terlayannya sebanyak 239 orang pensiunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Rekapitulasi pelayanan MPP dan Pensiun
Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	SK Pensiun karena memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)	196 217
2.	SK Pensiun Janda/Duda	20 14
4.	SK Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	4 —
	Jumlah	220 231

Jadi pada tahun 2023 realisasi pelayanan administrasi bagi PNS yang mengalami purnabakti sebanyak 220 orang

d) Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan penyajian data dan informasi ASN merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan pengolahan dan penyajian data ASN dengan beberapa butir kegiatan antara lain:

1. Melakukan update data kepegawaian pada sistem aplikasi yang digunakan dalam manajemen kepegawaian seperti SAPK.
2. Melakukan update data Kepegawaian pada Database lokal kepegawaian.
3. Mengelolah kearsipan dokumen kepegawaian ASN.
4. Melakukan penyajian data ASN berupa Data Bulanan dan 1 (satu) Tahun.

Secara keseluruhan hasil kegiatan penyajian data dan informasi ASN diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Daftar Update, Peremajaan dan Penyajian Data Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Volume
1.	Update Database Data Pangkat	637 Data
2.	Update Database Data JPT, Administrator dan Pengawas serta Kepala UPTD	75 Data
3.	Update Database Data Jabatan Fungsional	389 Data
4.	Update Database Data CPNS	655 Data
5.	Peremajaan Data pada SAPK untuk JPT, Administrator dan Pengawas serta Kepala UPTD	75 Data
6.	Peremajaan Data pada SAPK untuk Jabatan Fungsional	389 Dokumen
7.	Penyajian Data ASN Bulanan	1 file data
8.	Penyajian Rekap Data ASN Bulanan	1 file data
9.	Penyajian Data ASN 1 (satu) Tahun	1 file data
10.	Penyajian Rekap Data ASN 1 (satu) Tahun	1 file data
11.	Peremajaan data Unor	1 file data

Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Untuk itu dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem database kepegawaian, melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi dan melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara manual.

Target kinerjanya adalah tersajinya data file PNS Kabupaten Flores Timur. Realisasinya adalah pada tahun 2023, tersaji 3 dokumen data kepegawaian yaitu : Data Profil ASN, TAKA digital dan Nominatif ASN Pemda.

Adapun gambaran pengelolaan data kepegawaian yang merupakan inti pelayanan pada pos kegiatan ini selama tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut

a. Data Nominatif ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Jumlah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 keadaan 31 Desember 2023 mencapai 5.344 orang terdiri dari PNS : 4346 orang dan PPPK sebanyak 998 orang.

Tabel 3.11. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

PNS			PPPK			TOTAL
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	5344
1822	2524	4346	367	611	998	

Tabel 3.12. Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2023

PNS					PPPK			
No	Golongan	Jenis Kelamin		Jmlh	Golongan	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan	
1	Gol. I	15	2	17	V	10	0	10
2	Gol. II	320	367	687	VIII	35	110	145
3	Gol. III	1121	1927	3048	IX	332	462	794
4	Gol. IV	366	228	594	X	10	39	49
Total		1822	2524	4346	Total	387	611	998

Tabel 3.13. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

PNS					PPPK		
No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jmlh	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	14	5	19	-	-	-
2	SLTP	27	5	32	-	-	-
3	SLTA	437	314	751	10	0	10
4	D-1	2	15	17	-	-	-
5	D-II	69	45	114	-	-	-
6	D-III	190	748	938	35	110	145
7	S1/D-IV	1028	1358	2386	332	464	796
8	S2	56	32	88	10	37	47
9	S3	1	0	1	-	-	-
Total		1824	2522	4346	387	611	998

Tabel 3.14. Jumlah ASN berdasarkan Agama Tahun 2023

PNS					PPPK		
No	Agama	Jenis Kelamin		Jmlh	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	211	327	538	41	78	119
2	Katolik	1573	2132	3705	345	527	872
3	Kristen	35	61	96	1	5	6
4	Hindu	3	4	7	-	1	1
5	Budha	-	-	-	-	-	-
Total		1822	2524	4346	387	611	998

b. Data Jabatan Struktural

Tabel 3.15. Data Jabatan Struktural menurut Jabatan, Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi, Jabatan Lowong Keadaan 31 Desember Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Terisi	Lowong
1	JPT	IIa	1	1	-
		IIb	35	26	9
	Jumlah 1		36	27	9
2	Administator	IIIa	66	58	8
		IIIb	117	101	16
	Jumlah 2		183	159	24
3	Pengawas	IVa	218	156	62
		IVb	122	100	22
	Jumlah 3		340	256	84
Total			559	442	117

Tabel 3.16. Data Jabatan Struktural Kabupaten Flores Timur yang terisi menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Keadaan 31 Desember 2023

No	Jabatan		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	JPT	Ila	1	-	1
		Ilb	24	2	26
	Jumlah 1		25	2	27
2	Administator	IIla	54	4	58
		IIlb	78	23	101
	Jumlah 2		132	27	159
3	Pengawas	IVa	116	40	156
		IVb	53	47	100
	Jumlah 3		169	87	256
Total			326	116	442

e) Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian

Target kinerjanya adalah terpenuhinya PNS yang memiliki administrasi kepegawaian yang lengkap dalam hal ini berupa administrasi Kartu pegawai, Kartu Istri, Kartu suami dan Kartu Tabungan Pensiunan. Realisasinya sebanyak 4 Dokumen yang diproses dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.17. Rekapitulasi Pelayanan Karpeg,Taspen dan Karis/Karsu Tahun 2023

No	Jenis Usulan	Jumlah Usul	Sudah diproses	Belum Proses
1.	Penerbitan Karpeg	-	-	-
2.	Penerbitan Karis	30 ³⁰ 10	30 ¹⁰	-
3.	Penerbitan Karsu	30 ³⁰ 7	30 ⁷	-
4.	Penerbitan Taspen	-	-	-
	Jumlah	60	60	-

Selain melaksanakan tugas pengurusan karpeg, taspen dan karis/karsu, pada kegiatan ini juga melekat berbagai sub kegiatan tambahan yang menjadi tupoksi BKPSDMD dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun sub kegiatan tambahannya berupa mengurus mutasi gaji/berkala PNS Pemerintah kabupaten Flores Timur. Adapun realisasi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

Tabel 3.18. Rekapitulasi Pengurusan Mutasi Gaji/berkala Tahun 2023

No	Waktu (TMT)	Jumlah
1	Januari	265 590
2	Februari	89 51
3	Maret	410 778
4	April	128 93
5	Mei	5 5
6	Juni	14 25
7	Juli	11 12
8	Agustus	8 11
9	September	17 9
10	Oktober	73 19
11	November	15 4
12	Desember	131 163
	TOTAL	1166 SK 1.237

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

a) Sub Kegiatan : Pengeloaan Kenaikan Pangkat ASN

Target kinerjanya adalah terwujudnya administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,. Realisasinya sebanyak total 637 orang dengan diprosesnya usulan kenaikan pangkat sebanyak 763 berkas dan Mutasi PNS sebanyak 129 orang (Mutasi PNS antar OPD lingkup Pemkab Flotim, pindah masuk dan pindah Keluar)

Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19. Realisasi Pengurusan Mutasi Pangkat PNSD

Tahun 2023

No	Uraian	Usulan	BTL/TMS	Disetujui/MS	Ket
1	Kenaikan Pangkat April	517	122	395	
2	Kenaikan Pangkat Oktober	246	4	242	
	Total	763	126	637	

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 usulan kenaikan pangkat yang tidak dapat diproses atau dikenal dengan istilah BTL/TMS lebih sedikit dibandingkan tahun 2022. Alasan Batal (BTL) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah : Lebih Banyak pada Guru yang belum memiliki sertifikat Pendidik dan kasus lain PI yang sertifikat akreditasi institusinya tidak memenuhi persyaratan.

Selain melaksanakan tugas pengurusan mutasi kepangkatan, pada kegiatan ini juga melekat berbagai sub kegiatan tambahan yang menjadi tupoksi BKPSDMD dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun sub kegiatan tambahannya berupa pengurusan mutasi baik mutasi antar OPD termasuk mutasi keluar/masuk Pemerintah kabupaten Flores Timur. Adapun realisasi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

Tabel 3.20. Rekapitulasi Rekomendasi Pindah Keluar, Pindah Masuk, Mutasi antar OPD Tahun 2023

No	Uraian Sub kegiatan	Jumlah	Ket
1	Mutasi PNS antar OPD lingkup Pemkab Flotim - SK Mutasi Kerja	94	
2	Rekomendasi Pindah Masuk	14	
3	Rekomendasi Pindah Keluar	21	
	TOTAL	129 SK	

b) Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN

Target kinerjanya adalah jumlah jabatan yang terisi sesuai kebutuhan jabatan yang lowong. Realisasinya adalah : Pada Tahun 2023 hanya dilaksanakan Seleksi Terbuka Eselon IIa (Sekda). Kegiatan ini dilaksanakan pada September s.d Oktober 2023

**Tabel 3.21. Daftar Pelantikan Pejabat Struktural JPTP,
Administrator & Pengawas Tahun 2023**

No	Tgl Pelantikan	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	20 Januari 2023	JPTP (Pj.Sekda)	II.a	1 orang
2	11 Agustus 2023	JPTP	II.b	12 orang
		Administrator	III.a	7 orang
		Administrator	III.b	3 orang
	18 Agustus 2023	Administrator	III.a	1 orang
		Administrator	III.b	2 orang
		Pengawas	IV.a	14 orang
		Pengawas	IV.b	10 orang
	25 Agustus 2023	Administrator	III.a	1 orang
		Administrator	III.b	1 orang
		Pengawas	IV.a	3 orang
	22 Desember 2023	JPTP (Sekretaris Daerah)	II.a	1 orang
	Jumlah			56 orang

Sedangkan Rekapitulasi terkait Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23. Daftar Rekapitulasi Mutasi dalam Jabatan Fungsional Tahun 2023

No	Jenis Mutasi	Jumlah	Ket
1	Pengangkatan Pertama Kali	228 orang	
2	Pengangkatan Kembali	4 orang	
3	Kenaikan/Perpindahan Jabatan	132 orang	
4	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	25 orang	
5	Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK	649 orang	
6	Total	1038 orang	

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Target kinerja adalah Terlaksananya Ujian Dinas baik Ujian Dinas Tk.I, Ujian Dinas Tk.II, dan Ujian Penyesuaian Ijasah Bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Realisasinya adalah terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I

dan ujian Penyesuaian Ijazah sebanyak 1(satu) kali pelaksanaan kegiatan dengan pembebanan pada Anggaran BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, dengan jumlah peserta 50 orang. Berikut gambaran realisasi peserta kegiatan ini dari masing-masing tingkatan :

Tabel 3.24. Rekap Peserta Ujian Dinas & Penyesuaian Ijazah Tahap I Tahun 2023

No	JENIS UJIAN	JUMLAH USULAN	HADIR (Mengikuti Ujian)	Keterangan
1.	UJIAN DINAS			1. 1 Peserta Ujian Dinas Tingkat I, TMS. 2. Peserta yang hadir semuanya lulus dan sudah memperoleh Sertifikat.
	Tingkat I	35	34	
	Tingkat II	5	4	
2.	PENYESUAIAN IJAZAH			
	S1	13	11	
	D3	-	-	
	D2	-	-	
	SLTA-PAKET C	1	-	
	SLTP-PAKET B	1	1	
	TOTAL	55	50	

a) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta mengembangkan kepribadian aparatur yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan kesempatan kepada seluruh PNS untuk melanjutkan pendidikannya baik melalui sistem Ijin Belajar maupun Tugas Belajar. Sasaran utamanya adalah seluruh PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pendasaran kegiatan ini adalah sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 20022 tentang Tugas Belajar bagi PNS Daerah. Pada tahun 2023 ini, Target kinerjanya adalah meningkatkan jenjang pendidikan PNS dengan melayani semua proses kepegawaian menyangkut

permohonan Tugas Belajar, Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil maupun Ikatan Dinas sebanyak 75 orang. Realisasinya dapat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.25 Jumlah Mahasiswa Tugas belajar Tahun 2023

No.	Bidang Minat/Kompetensi	Tugas Belajar	Ijin Belajar	Ikatan Dinas
1.	Tenaga Kesehatan	22		-
2.	Tenaga Guru	15		-
3.	Tenaga Teknis Lainnya	66		-
	Jumlah	103 orang		-

1. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan/reward bagi PNS yang menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Adapun untuk mencapai target kegiatan ini, sebelumnya melewati tahapan uji petik di lapangan sebelum diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia. Kegiatan Pemberian Satya lancana Karya Satya bagi PNS merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan 3 (tiga) jenis penghargaan yaitu bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun. Satya lancana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat, motivasi dan dedikasi kinerja PNS, serta menimbulkan kebanggaan karena pengabdian mereka dihargai oleh negara. Lebih jauh, PNS yang menerima penghargaan ini seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi rekan-rekan PNS di lingkungan SKPD mereka masing-masing. Tahun 2023 usulan sebanyak 20 orang PNS yang akan Menerima Tanda Kehormatan satya Lancana karya Satya di tahun 2024

b) Sub Kegiatan : Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS

Sesuai amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan

pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengukuran persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin PNS.

Target kinerjanya adalah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang maupun berat sebanyak 20 kasus. Realisasinya adalah selama tahun 2023 terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 25 kasus (125%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.26. Tabel Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2023

No.	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Keterangan
1	18 Kasus PNS <i>30 kas 2 bul → 25 usul lups</i>	15 Kasus Pembinaan Internal Oleh Atasan Langsung 3 kasus telah dilakukan pemeriksaan Inspektorat
2	3 Kasus PNS <i>3 kasus konti</i>	4 Kasus PNS diberhentikan sementara PTDH
3	1 Kasus PNS <i>layak dpt. (4)</i>	1 Kasus PNS dalam proses usulan Pemberhentian dengan hormat alasan sakit.
4	1 Kasus PPPK <i>7</i>	1 Kasus PPPK diberhentikan dengan hormat tidak atas Permintaan sendiri sebagai PPPK
5	1 Kasus PNS <i>5</i>	1 Kasus PNS diberikan Ijin Perceraian
	Sub Total	- 24 ASN
No.	Jumlah PNS yang Tersangkut kasus Tindak Pidana Korupsi	Keterangan
1.	1 PNS	1 PNS dikenakan Penjatuhan Sanksi Administratif Kepegawaian berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS(Karena Kasus Tipikor)
	Sub Total	1 PNS
	TOTAL	25 PNS

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran yang tersedia untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp. 46.999.720,- dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 46.666.680,- atau 99,29%. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

a) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Target kinerjanya adalah Jumlah ASN yang tersertifikasi sebanyak 20 orang.

Realisasinya adalah 24 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27. Tabel Asn tersertifikasi tahun 2023

No	Nama	Jabatan/Instansi	Jenis sertifikasi (yang diikuti)
1	ALAI DA INA LAMABLAWA	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
2	CHRISTINA YULIANA OSE BETAN	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
3	YULIUS EMANUEL DOSINAEN	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
4	IDA BENGTA TUPEN	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5	YOHANES DJUANG SAKERA	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
6	PETRONELA PERADA MANGU	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
7	AMARIUS ALI	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
8	KASMIRUS SETU KOPONG	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
9	IGNASIUS TOBI EBAK	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
10	HANA IYDIA BULAKH	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
11	PETRONELA PERADA MANGU	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
12	KATARINA MARIA IGON	PENGELOLA PERUMAHAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
13	YOHANES BALAKOTEN	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
14	PETRUS PAULUS SANI KEDANG	ANALIS KEPEGAWAIAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
15	SUSANA SINA	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
16	MARIA YANUARIS LAJU RURON	KASI BIMAS	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
17	FERY KRISTIANTI	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
18	MAGDALENA MAGI LEWOTAN	ANALIS KEPEGAWAIAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
19	KRISTIANA	ANALIS SDMA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
20	CAECILIA	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
21	MARIA ANJELIN JAWA LEIN	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI

22	HUZAIFAH SYARIFUDIN,SE	ANALIS SDMA AHLI MUDA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
23	MARIA GORETTY LAU KERANS,SE	ANALIS SDMA AHLI MUDA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
24	MARSELINUS AIMA	PENYULU PERTANIAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu Alat Pengolah data yang rusak karena tingginya beban pekerjaan sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
- 2) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Kepentingan peningkatan kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- 3) Dukungan dari OPD/instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian masih belum maksimal sehingga kadang menghambat pada proses administrasi berikutnya.
- 4) Tingkat kedisiplinan para pegawai yang masih rendah.
- 5) Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan secara menyeluruh.
- 6) Maraknya kasus pelanggaran disiplin oleh PNS, termasuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Masih rendahnya tingkat pemahaman regulasi kepegawaian terutama oleh pengelola kepegawaian dari setiap OPD yang menyebabkan terhambatnya pengurusan hak-hak kepegawaian yang merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

b. Solusi

Untuk mengatasi hambatan dan masalah tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kebutuhan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas .

- 2) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan OPD lain yang terkait baik di Pusat, maupun di Regional X Denpasar, termasuk perubahan regulasi.
- 3) Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi yang baik dengan OPD lainnya dalam menata manajemen kepegawaian di daerah.
- 4) Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis / fungsional maupun kepemimpinan dengan maksud untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan pegawai dalam meningkatkan pelayanan serta terbinanya administrasi yang tepat orang, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas.
- 5) Alokasi anggaran lebih ditingkatkan lagi dalam memfasilitasi kegiatan kepegawaian baik peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kompetensi SDM Aparatur.
- 6) Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan.
- 7) Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara lebih tegas lagi terhadap seluruh Pegawai guna meningkatkan kedisiplinan.
- 8) Peningkatan kerjasama dengan pihak Provinsi dalam rangka koordinasi teknis yang lebih matang dalam pelaksanaan seleksi jabatan.
- 9) BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dengan serius menangani seluruh kasus pelanggaran disiplin PNS.
- 10) Setiap OPD wajib menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional baik melalui pola kerjasama dan pengiriman kepada lembaga.

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Tidak ada	-	-

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Tidak ada	-	-

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

(Tidak Ada)

BAB V

PENUTUP

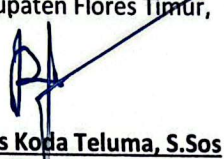
Secara umum pelaksanaan Program Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan terkhusus pada pelaksanaan urusan wajib mampu mencapai angka pencapaian diatas 90%. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang meskipun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki secara terus-menerus.

Diharapkan juga agar informasi yang termuat dalam Laporan ini dapat bermanfaat sebagai data pendukung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Larantuka Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,


/ Rufus Koda Teluma, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005